

## Sulteng Terkorup

# Kejati Siap Usut Temuan Fitra

PALU, MERCUSUAR – Kejati Sulteng merespon dan siap menindaklanjuti temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa Sulteng merupakan provinsi terkorup dalam pengelolaan APBD tahun 2010 dengan nilai Rp170 miliar (M).

"Kami (Kejati Sulteng) segera menelusuri temuan tersebut. Sebab kami akan menindaklanjutinya, penyidik harus memiliki bukti awal," ujar

Kajati Sulteng, M Isa Ansary SH didampingi Aspidsus, H Abul H Rabunah SH, Selasa sore (21/6).

**M**  
Dapat diakses di  
[www.harianmercusuar.com](http://www.harianmercusuar.com)

Olehnya, dalam upaya pengungkapan dugaan korupsi, diharapkan peran serta seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat di Sulteng. Mengingat pihaknya tak dapat bekerja sendiri dalam penanganan dan pengungkapan

kasus korupsi.

"Peran masyarakat dapat berupa laporan tertulis mengenai indikasi adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, laporan harus objektif, jangan ada disembunyikan atau ditambah," ujar mantan Wakil Kajati Sulawesi Selatan itu.

Diakuinya, terkait temuan Fitra, pihaknya (Kejati) telah mendatangi

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng. Dalam dialog itu, KNPI berjanji untuk membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi di Sulteng, termasuk dugaan korupsi pengelolaan APBD di Sulteng tahun 2010 sekira Rp170 M.

Masih menurut Kajati, dihimbau agar masyarakat khususnya di

Baca TEMUAN di hal. 11

## Peran Masyarakat Diharapkan

### TEMUAN

sambungan dari hal. 1

Sulteng, untuk menaati hukum. Apabila dipanggil Kejaksaan atau aparat penegak hukum lain untuk dimintai keterangannya, baik sebagai saksi, ahli maupun tersangka, harus hadir.

"Jadikanlah hukum di negara ini sebagai panglima. Sehingga tak ada alasan untuk tak datang saat dipanggil jalani pemeriksaan untuk penegakan hukum," tutupnya.

#### BELUM MAKSIMAL

Mengenai pemberantasan korupsi, Kapolda Brigjen Pol Dewa Parsana mengaku pihaknya belum maksimal. Hal itu disebabkan minimnya personel yang khusus bergerak di bidang korupsi.

Didampingi Wakapolda Sulteng, Kombes Pol Ari Dono, Dir Reskrim-sus, Kombes Pol Taufik Triatmojo dan Wadir Reskrim AKBP Torik,

Dewa Parsana mengatakan, sampai saat ini, pihaknya hanya memiliki dua unit tim anti korupsi, yang masing-masing unit beranggotakan enam personel. Belum lagi ketika ada kasus kriminal, personel ini kadang dimintai bantuannya untuk pengungkapan kasus kriminal itu, sehingga kasus korupsi penyelesaiannya agak terlambat. Namun jika ditanyai soal komitmen dalam pemberantasan kasus korupsi, katanya, Polda sangat antusias.

Mengenai temuan-temuan BPK, Kapolda menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan BPK yang mengindikasikan perbuatan pidana. Selama ini, sambungnya, temuan-temuan BPK hanya masalah administrasi saja.

"Memang temuan itu tidak selamanya perbuatan pidana, karena bisa saja terjadi kesalahan administrasi. Sepanjang ada temuan yang mengindikasikan terjadinya perbuatan korupsi, Polda juga siap tangani. Buat apa kita mendam-mendam kasus, hanya

bikin penyakit saja," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasil survey Fitra menyatakan Sulteng sebagai daerah terkorup pada tahun 2010, patut direspon aparat hukum.

Fitra dalam dialog di Metro TV dengan Mendagri merilis kerugian keuangan Sulteng mencapai Rp170 M. menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, menyatakan jika temuan Fitra benar, maka ada sekira 11 persen kebcoran APBD Sulteng yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun.

"Jika benar itu besar sekali. Saya kira Fitra bisa melaporkannya ke aparat hukum dan memberikan datanya ke Deprov sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Sebaliknya, aparat hukum juga harus merespon ini dan segera melakukan penelusuran," ujar Markus, ditemui di ruang kerjanya Senin (20/6).

Hasil survey Fitra kata Markus, jauh dengan temuan BPK yang merupakan acuan resmi dan standar audit keuangan Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng, saldo kerugian daerah Pemrov Sulteng berdasarkan hasil pemantauan terhadap penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebesar Rp84,10 miliar dengan jumlah 42 kasus.

Sebelumnya, kasus kerugian keuangan daerah sejak tahun 1989 hingga 2010 berjumlah 44 kasus dengan nilai Rp88,99 miliar. Hanya saja dua kasus dengan nilai Rp177,36 juta telah diselesaikan, sedangkan yang diangsur sebanyak 13 kasus sebesar Rp4,71 miliar.

Saldo kerugian daerah tersebut dilaporkan BPK RI Perwakilan Sulteng berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulteng Tahun Anggaran (TA) 2010. Dalam laporan tersebut, disebutkan jumlah temuan senilai Rp51,09 miliar atau 1,38 persen dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp3,69 triliun. Sehingga, BPK RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). **AGK/GUS**